



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1594/Bld.2/Lit/S/8/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen
Hal : Undangan *Focus Group Discussion*
(FGD)

Jakarta, 29 Agustus 2023

Yth.

1. **Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;**
 2. **Hakim Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;**
 3. **Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia;**
 4. **Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.**
- di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan mengadakan Kegiatan Penyusunan Naskah Kajian Tahun Anggaran 2023 dengan judul **“Implementasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim.”** Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak/Ibu bersedia mengikuti **Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 4 September 2023

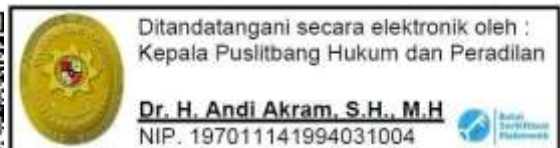
Waktu : Jadwal Acara Terlampir

Tempat : Secara Virtual (Hybrid) dengan Link Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/9211174418?pwd=NIUzRGdnTkpSZXo3UjVjWGowOWNrQT09>
Meeting ID: 921 1117 4418 Passcode: kajianKY

Apabila ada hal - hal yang ingin ditanyakan terkait substansi dapat menghubungi Koordinator Tim Bapak Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. melalui kontak (0811-384-011), serta hal - hal terkait administrasi dapat menghubungi Sekretariat Tim Bapak Novie Kurniawan Witianto, S.H., M.H. melalui kontak (0813-1798-4427).

Dalam memberikan pelayanan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

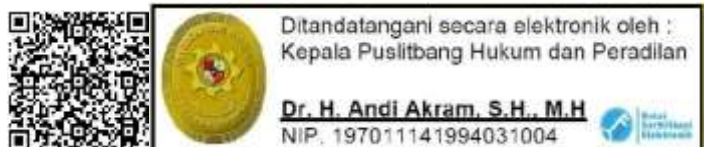
1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
3. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
4. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI;
5. Plt. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Puslitbang Kumdil MA RI.

**Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai UU ITE Pasal 11, tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah*

Lampiran I - Surat Undangan
Nomor : 1594/Bld.2/Lit/S/8/2023
Tanggal : 29 Agustus 2023

SUSUNAN JADWAL KEGIATAN

No.	Pukul	Mata Acara	Keterangan
Senin, 4 September 2023			
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Hotel
2.	08.30 - 09.30	Pembukaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	<i>Meeting Room</i>
3.	09.30 – 10.30	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) sesi I Penyampaian materi Narasumber : Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Materi: “Dinamika kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim dan kemandirian Hakim”	<i>Meeting Room</i>
4.	10.30 – 11.55	Sesi Tanya Jawab	<i>Meeting Room</i>
5.	11.55 – 12.00	Sesi Foto Bersama I	<i>Meeting Room</i>
6.	12.00 – 13.30	<i>ISHOMA</i>	Hotel
7.	13.30 – 14.30	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) sesi II Penyampaian materi Narasumber : 1. Dr. H. Harjono, S.H., MCL. Materi: “Filosofi dan Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial” 2. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum (Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI) Materi: “Implementasi wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.”	<i>Meeting Room</i>
8.	14.30 – 16.30	Sesi Tanya Jawab	Hotel
9.	16.30 – 17.00	Summary (Tim Penyusun - Notulen)	<i>Meeting Room</i>



**Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai UU ITE Pasal 11, tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah*